PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM ANTAR WARGA DESA

Budi Aspani
e-mail; budiaspani@yahoo.com

ABSTRACT

Village Government consists of Village Head and Village Device as regulated in the above mentioned village law. That one of the duties and responsibilities of the Village Head is to reconcile the rural community disputes. The type of research used is empirical legal research and by using primary, secondary, and non-legal legal materials. The legal material can then be analyzed qualitatively. Qualitative analysis is done by describing the data generated in the form of explanations or descriptions of sentences to answer the subject matter. The results obtained that: The Village Head acts as a mediator and guided by deliberation to consensus. Disputes that can not be settled then both parties are handed over to the authorities or the authorities. Inhibiting Factors Lack of knowledge of the villagers of Parit about the role of village heads in settling disputes between citizens; The unambiguous provisions of the law on paradigms or models of disputes and disputes to be resolved by the Village Head; The community sometimes considers that if he reports or resolves through the village level, it means making a disgrace of himself in his neighborhood. Pushing Factors Starting the growing level of public awareness to create a safe and orderly environment in Parit Village; The Parit Village community is a homogeneous society so that people's tolerance is very good.

Keywords: Village Head; Disputes; Residents

ABSTRAK

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam undang - undang tentang desa tersebut di atas. Bahwa salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum yang di dapat kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat guna menjawab pokok permasalahan. Hasil penelitian diperoleh bahwa : Kepala Desa berperan sebagai mediator dan berpedoman pada musyawarah untuk mufakat. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka kedua belah pihak diserahkan kepada yang berwenang atau pihak berwajib. **Faktor Penghambat** Kurangnya pengetahuan masyarakat desa Parit tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antar warga; Tidak tegasnya ketentuan perundangan tentang paradigma atau model-model perselisihan dan sengketa yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa; Masyarakat terkadang menganggap bahwa bila ia melaporkan atau menyelesaikan melalui tingkat desa, berarti membuat aib sendiri dilingkungan tempat tinggalnya. **Faktor Pendorong** Mulai tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan tertib dilingkungan Desa Parit; Masyarakat Desa Parit adalah masyarakat yang bersifat homogen sehingga toleransi masyarakat sangat baik.

Kata Kunci : Kepala Desa; Perselisihan; Warga

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk,

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.¹ Pada umumnya masyarakat desa belum memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan dan hukum yang ada. Pada saat ini umumnya masyarakat desa lebih menuntut hak dari pada kewajibannya. Masyarakat desa belum banyak mengetahui tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Masyarakat beranggapan bahwa Kepala Desa hanya berfungsi sebagai pimpinan agama atau pemimpin adat, pengayom, pelindung dan yang dituakan, lebih lanjut kedudukan Kepala Desa menurut Pasal 25 (2) Inlandsch Reglement adalah: Jika ada perselisihan faham antara penduduk desa dilapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka Kepala Desa dengan bantuan para petua masyarakat mengadili perselisihan itu dengan cara mendamaikan.

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga di Desa Parit Kecamatan Rambutan

¹ HAW. Widjaja, Optonomi Desa, PT. Raja Grfindo Peersada, Jakarta, 2003, Hlm.4

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga di desa ?
2. Faktor - faktor apa saja yang menghambat dan mendorong peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga di desa ?.

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan faktor yang menghambat dan mendorong peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga di desa.

D. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²

2. Bahan Hukum

² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 18-19

Bahan hukum yang di gunakan yaitu; bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut yaitu;
 - a. Peraturan perundang-undangan
 - b. Catatan-catatan resmi tau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan
 - c. Putusan Hakim³
2. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.
 - a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, misalnya; skripsi, tesis, dan disertasi hukum
 - b. Kamus-kamus hukum
 - c. Jurnal-jurnal hukum dan
 - d. Komentar-komentar atas putusan hakim⁴
3. Bahan-Bahan Non hukum
Bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.⁵
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Di karenakan tipologi penelitian hukum empiris maka pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu; melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum data lapangan yang di dapat di kumpulkan, baik hasil pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Kemudian di susun

kembali agar menjadi bahan hukum. Analisis bahan hukum di lakukan secara kualitatif.. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat kemudian dibuat kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

A. Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Antar Warga Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kepala Desa sebagai subyek hukum administrasi negara yang menjalankan tugas-tugasnya melalui pelimpahan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku, selain daripada itu Kepala Desa juga merupakan seorang pimpinan tertinggi di tingkat desa.

Sebagai seorang pemimpin Kepala Desa harus dapat berperan sebagai administrator yaitu menjalankan tata tertib administrasi pemerintahan dari mulai perencanaan sampai implementasinya. Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan warga yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, disini Kepala Desa bertindak sebagai stabilisator dan juga Kepala Desa dapat bertindak sebagai mediator ataupun hakim perdamaian di desa.

Dalam mendamaikan perselisihan yang ada pada masyarakat desa, Kepala Desa berperan sebagai mediator bagi pihak yang berselisih. Dalam menjalankan peranannya tersebut Kepala Desa selalu berpedoman kepada musyawarah untuk mencapai mufakat yang hasilnya mengikat pihak yang berselisih sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, jika terjadi perselisihan atau sengketa antara warga di desa, Kepala Desa

³ *Ibid.*, hlm 47

⁴ *Ibid.*, hlm 54

⁵ *Ibid.*, hlm 57

berpedoman kepada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 208 yang berbunyi, Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁶

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Kepala Desa di bidang ketentraman dan ketertiban dapat mendamaikan perselisihan yang terjadi di desa". Berdasarkan Pasal 48 huruf (k) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa⁷ Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa berperan sebagai penengah bagi warga yang berselisih atau yang bersengketa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang yang menyempurnakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 untuk mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, aman dan tentram maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa, Kepala Desa berperan sebagai mediator untuk mencapai suatu perdamaian segala perselisihan atau sengketa yang telah di damaiakan oleh Kepala Desa harus benar-benar berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

⁶ UU.RI. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, KARINA, Surabaya, 2005, hal.330.

⁷ Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006, Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, 2006, hal..16.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasin J. Kepala Desa Parit Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa yang terjadi di desa Parit adalah menyangkut hukum publik dan hukum privat antara lain:

- a. Perselisihan Rumah Tangga;
- b. Perselingkungan;
- c. Gadai tanah kebun, perebutan hasil bumi pada perbatasan kebun; dan
- d. Kenakalan remaja.

Latar belakang yang menyebabkan perselisihan sengketa tersebut menurut wawancara dengan Kepala Desa Parit Bapak Kasin J, jika perselisihan rumah tangga untuk bercerai biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau si suami mau kawin lagi dalam arti suami ingin mempunyai istri muda, dan masalah gadai kemungkinan yang menggadaikan atau yang mempunyai kebun atau sawah mempunyai kebutuhan dana yang sangat mendesak, dan kenakalan remaja penyebabnya kurangnya pendidikan di rumah, pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya tersebut.

Dalam menjalankan peranannya sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antar warga, Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan perwakilan tingkat desa, para wakil rakyat atau dapat pula rakyat secara langsung, melakukan musyawarah atau mufakat dengan pemerintah desa agar tercapai keserasian antara yang diperintah dengan yang memerintah.

Prosedur penyelesaian perselisihan antar warga di desa Parit menurut Kepala Desa Bapak Kasim J. dihadiri oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, para tokoh adat desa adalah sebagai berikut:

1. Memanggil kedua belah pihak yang berselisih;
2. Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan para tokoh masyarakat;
3. Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan para tokoh masyarakat berusaha mendamaikan perselisihan diantara kedua belah pihak. Jika perselisihan tersebut dapat di damaiakan, maka dibuatkan surat perdamaian diatas segel yang berlaku. Jika ada suatu perkara ataupun persengketaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa harus mengirimkan kedua belah pihak kepada Camat kepala wilayah atasan Kepala Desa atau kepada pihak yang berwenang untuk mengadili, yaitu pengadilan negeri. Menurut data yang peneliti peroleh, bahwa persolaan yang terjadi di Desa Parit Kecamatan Rembutan Kabupaten Banyasin selalu dapat ditangani oleh Kepala Desa. Kepala Desa tidak berwenang menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak yang bersangkutan maupun kepada salah satu pihaknya, kecuali dalam bentuk perdamaian.

Mengenai hak dan tanggungjawab perangkat desa dalam membantu Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa, menurut Kepala Desa segala yang di putuskan oleh Kepala Desa, perangkat desa selalu mendukung sejauh itu tidak menyalahi peraturan dan perundang-undangan serta sepanjang keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak yang berselisih atau bersengketa.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Kepala Desa adalah subyek hukum

administrasi negara yang menyelenggarakan tugas-tugas negara melalui pelimpahan. baik pelimpahan yang diberikan oleh undang-undang atau pelimpahan yang di dasarkan atas instruksi atasannya. Oleh karena itu demi terselenggaranya tugas-tugas negara tersebut, maka Kepala Desa memiliki suatu peranan dan wewenang.

Hanya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa tidak boleh melebihi batas wewenang yang diberikan undang-undang maupun oleh instansi atasannya tersebut. Salah satu bentuk dari peranan dan wewenangnya adalah menangani dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desanya.

B. Dampak Putusan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Warga Terhadap Peradilan Umum

1. Secara De Jure

Sebagaimana telah diketahui, bahwa keputusan Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar warga itu dianggap sedemikian pentingnya, karena keputusannya yang dikeluarkannya tersebut mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yang di dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan-perselisihan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Hal ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Adapun dampak dari keputusan Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar warga, apabila ditinjau dari sudut perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan atau tidak menimbulkan *over lapping* (tumpang tindih) dengan kewenang (kompetensi) yang dimiliki oleh Peradilan Umum, yaitu Hakim Pengadilan Negeri,

karena keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 huruf (k) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. Segala perselisihan yang telah di damaiakan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”. disamping hukum adat yang berlaku.

Dari uraian penjelasan pasal tersebut, telah membuktikan bahwa betapa pentingnya putusan Kepala Desa bagi pihak yang berselisih, dan hal ini sekaligus menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa apabila ditinjau secara De Jure tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Peradilan Umum, atau dengan kata lain bahwa keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa tidak menimbulkan Over Lapping (tumpang tindih) dengan kewenangan yang dimiliki Peradilan Umum atau peradilan negeri.

Menurut keterangan dari Kepala Desa Parit, mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa yang terjadi di desa melalui musyawarah untuk mufakat.

Apabila perselisihan dapat diatasi, maka dibuatkan surat perjanjian perdamaian yang bersifat mengikat di atas segel dan harus dipenuhi oleh para pihak yang berselisih tersebut. Dari uraian tersebut di atas, jelas tampak keputusan Kepala Desa terhadap Peradilan Umum tidak tumpang tindih.

2. *Secara De Facto*

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa secara De jure keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan

yang terjadi antara warga tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Umum, namun realitasnya secara De facto masih ada keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa yang menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Umum. Cohtoh : Kepala Desa dapat menyelesaikan masalah pembagian tanah warisan, yang terletak di salah satu dusun dalam Desa Parit tersebut.

De Facto dewasa ini masih ada keputusan Kepala Desa yang menimbulkan over lapping (tumpang tindih) dengan kewenangan yang dimiliki Peradilan Umum (Hakim Pengadilan Negeri), tetapi warga masyarakat yang bersangkutan masih mau menerima dan mengakui keputusan yang dikeluarkan Kepala Desanya dalam jabatan selaku Mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa Parit Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Hal tersebut terjadi, karena warga masyarakat yang bersangkutan lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membentuk perjanjian perdamaian dari masalah yang terjadi di selesaikan secara kekeluargaan dan berdasarkan hukum yang ada (hukum positif). Disamping itu tidak lupa diikuti sertakannya lembaga adat dalam mengatasi masalah perselisihan yang terjadi antar warga.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendorong Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Antar Warga Di Desa

1. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Parit Bapak Kasim J. faktor penghambat dalam peranannya

menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar warga adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa Parit Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 16 Huruf (k) tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antar warga, hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi aparat desa maupun kurangnya pemahaman aparat desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan yang ada tidak tegas, karena tidak menjelaskan dan menerangkan paradigma-paradigma atau model-model perselisihan dan sengketa yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa berbentuk perkara perdata atau perkara pidana atau berbentuk perselisihan-perselisihan yang lebih kecil, sehingga konsekuensinya tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Umum.
- c. Masyarakat terkadang merasa malu untuk melaporkan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi padanya dan menganggap bahwa bila ia melaporkan atau menyelesaikan melalui tingkat desa, berarti membuat aib sendiri dilingkungan tempat tinggalnya.

2. Faktor Pendorong

Yang menjadi faktor pendorong Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar warga desa adalah sebagai berikut:

1. Mulai tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan tertib dilingkungan Desa Parit.

2. Masyarakat Desa Parit adalah masyarakat yang bersifat homogen sehingga toleransi masyarakat sangat baik.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antar warga desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu mendamaikan perselisihan yang ada pada masyarakat desa, berperan sebagai mediator dan berpedoman pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa maka Kepala Desa menyerahkan kedua belah pihak kepada yang berwenang atau pihak berwajib.
2. Faktor Penghambat dan Pendorong Peranan Kepala Desa.

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa Parit Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 16 Huru (k) tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antar warga.
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan yang ada tidak tegas, karena tidak menjelaskan dan menerangkan paradigma-paradigma atau model-model perselisihan dan sengketa yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa.
- c. Masyarakat terkadang merasa malu untuk melaporkan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi padanya dan menganggap

bahwa bila ia melaporkan atau menyelesaikan melalui tingkat desa, berarti membuat aib sendiri dilingkungan tempat tinggalnya.

Faktor Pendorong

- a. Mulai tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan tertib dilingkungan Desa Parit.
- b. Masyarakat Desa Parit adalah masyarakat yang bersifat homogen sehingga toleransi masyarakat sangat baik.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bsnyuasin Tahun 2006, Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, *Desa dan KeKepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Jakarta, 1985.
- HAW Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Soerdjono Soekanto, *Pengantas Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soewarno Handajadiningrat dan R. Hidratmo, *Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1986.
- WJS. Poerwadarminta, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.